



Hk.04.01/189

**MENTERI NEGARA  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BAPPENAS**

KEPUTUSAN  
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR: KEP. 310 /M.PPN/11/2002

TENTANG

PENUNJUKAN DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM NEGOSIASI  
*SUSTAINABLE CAPACITY BUILDING FOR DECENTRALIZATION PROJECT*  
DENGAN *ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB)*

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi yang berlandaskan prinsip-prinsip *good governance* melalui usaha-usaha peningkatan kapasitas daerah;
  - b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut dalam huruf a diperlukan dukungan dana luar negeri untuk mendukung pembiayaan komponen pelaksanaan kegiatan yang selama ini menjadi hambatan;
  - c. bahwa untuk menjamin hasil guna dan daya guna pinjaman dana dalam negosiasi pinjaman Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dengan *Asian Development Bank (ADB)* diperlukan susunan keanggotaan yang mencerminkan instansi-instansi terkait;
  - d. bahwa pejabat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi persyaratan yang diperlukan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Delegasi Pemerintah Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004;

3. Keputusan ...

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002;
4. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995 dan Nomor KEP.031/KET/5/1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor KEP.050/M.PPN/03/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM NEGOSIASI *SUSTAINABLE CAPACITY BUILDING FOR DECENTRALIZATION PROJECT* DENGAN *ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB)*.

PERTAMA : Menunjuk Delegasi Pemerintah Republik Indonesia yang terdiri atas Tim Negosiasi dan Tim Teknis untuk melakukan negosiasi *Sustainable Capacity Building for Decentralization Project* dengan *Asian Development Bank (ADB)* pada tanggal 7-8 November 2002 di Jakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Delegasi Pemerintah Republik Indonesia wajib melaporkan hasil negosiasi *Sustainable Capacity Building for Decentralization Project* dengan *Asian Development Bank (ADB)* tersebut kepada Menteri Keuangan, Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, dan Menteri Dalam Negeri.

KETIGA ...

- KETIGA : Segala biaya yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan negosiasi *Sustainable Capacity Building for Decentralization Project* dengan *Asian Development Bank (ADB)* tersebut dibebankan kepada anggaran masing-masing instansi yang terkait.
- EEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 6 November 2002

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



KWIK KIAN GIE

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR : KEP. 310 /M.PPN/11/2002  
TANGGAL : 6 NOVEMBER 2002

SUSUNAN ANGGOTA DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM NEGOSIASI  
*SUSTAINABLE CAPACITY BUILDING FOR DECENTRALIZATION PROJECT* DENGAN *ASIAN  
DEVELOPMENT BANK (ADB)*

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM NEGOSIASI

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. S. Nurbaya<br>Sekretaris Jenderal, Departemen Dalam Negeri.   | Ketua       |
| 2. Bambang Bintoro Soedjito<br>Deputi Bidang Otonomi Daerah dan<br>Pengembangan Regional, Kantor Meneg PPN/Bappenas. | Wakil Ketua |
| 3. Oentarto Sindung Mawardi<br>Direktur Jenderal Otonomi Daerah,<br>Departemen Dalam Negeri.                         | Anggota     |
| 4. Machfud Sidik<br>Direktur Jenderal PKPD, Departemen Keuangan.   | Anggota     |
| 5. Anshari Ritonga<br>Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan.   | Anggota     |
| 6. Yuswandi A. Temenggung<br>Kepala Pusat Administrasi Kerjasama,<br>Departemen Dalam Negeri.                        | Anggota     |
| 7. I Made Suwandi<br>Direktur Fasilitasi Kebijakan dan Pelaporan<br>Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri.         | Anggota     |
| 8. Timbul Pudjianto<br>Karo Perencanaan, Departemen Dalam Negeri.  | Anggota     |

- |   |         |
|---|---------|
| 9. Max H. Pohan<br>Direktur Pengembangan Otonomi Daerah,<br>Kantor Menneg PPN/Bappenas              | Anggota |
| 10. Syahrial Loetan<br>Direktur Pendanaan LN-Multilateral,<br>Kantor Menneg PPN/Bappenas.           | Anggota |
| 11. Arlen T. Pakpahan<br>Direktur Pembiayaan dan Pinjaman Daerah,<br>Departemen Keuangan.           | Anggota |
| 12. Edi Karsanto<br>Direktur Dana Luar Negeri, Departemen Keuangan.                                 | Anggota |
| 13. Triyuni Soemartono<br>Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah,<br>Departemen Dalam Negeri | Anggota |
| 14. Agus Utara Effendi<br>Bupati Kabupaten Bogor  | Anggota |
| 15. H. Munir<br>Bupati Kabupaten Pematang   | Anggota |
| 16. Ibnu Subiyanto<br>Bupati Kabupaten Sleman   | Anggota |

#### SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS

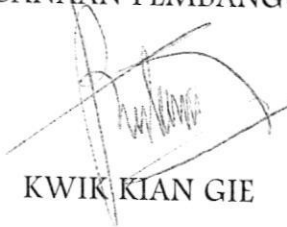
- |   |         |
|---|---------|
| 1. I Made Suwandi<br>Direktur Fasilitas Kebijakan dan Pelaporan<br>Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri.                             | Ketua   |
| 2. Saut Situmorang<br>Kabag. Perencanaan Otonomi Daerah,<br>Sekretariat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah,<br>Departemen Dalam Negeri. | Anggota |

3. Achmad ...

3. Achmad Kamil Anggota  
Kasubdit Supervisi Lingkup I,  
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah,  
Departemen Dalam Negeri.
4. Obrian Saragih Anggota  
Kasubdit Multilateral II,  
Kantor Menneg PPN/Bappenas.
5. Putu Riasa Anggota  
Kasubdit Pengembangan Keuangan Daerah,  
Kantor Menneg PPN/Bappenas.
6. Christian Dwi P. Anggota  
Kasubdit Pengembangan SDM Aparatur  
Pemerintah Daerah, Kantor Menneg PPN/Bappenas.
7. Daryll Ichwan A Anggota  
Kasubdit Pengembangan Kelembagaan dan  
Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah,  
Kantor Menneg PPN/Bappenas.
8. Nyoman Serutama Anggota  
Kasubdit PHLN IV, Departemen Keuangan.
9. Victor Waluyono Anggota  
Kasubdit Pinjaman Daerah,  
Direktorat Jenderal PKPD, Departemen Keuangan.
10. E. Berland Suhermawan Anggota  
Kasi PHLN/A, Departemen Keuangan.
11. Prapto Yuliano Anggota  
Kasi PA I/P IV, Departemen Keuangan.

12. Darwis Sitinjak  
Kasi Kabupaten, Subdit Fasilitasi Implementasi  
Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri. Anggota
13. Mesranian  
Sekretariat Jenderal, Departemen Dalam Negeri. Anggota

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



KWIK KIAN GIE